

## Berita Lingkungan Hidup

### Hibah Percepat Implementasi Skema Pengurangan Emisi

Jakarta, Kompas - Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan perangkat kebijakan dan aturan implementasi skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan plus dalam waktu tiga tahun. Hal itu dinyatakan Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim Ismid Hadad di Jakarta, Senin (5/4).

Ismid Hadad menyatakan, Climate Investment Fund (CIF) memberikan hibah 80 juta dollar AS kepada Indonesia. "Dengan kucuran hibah itu, Pemerintah Indonesia harus melaksanakan skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi lahan (REDD) plus. Dan, dalam tiga tahun ini Indonesia harus siap melaksanakan," katanya.

Menurut dia, Indonesia belum memutuskan proyek yang akan dibiayai dengan dana hibah yang yang disalurkan melalui Multilevel Development Bank itu. "Dana hibah itu bisa untuk membiayai penyusunan kebijakan dan perangkat aturan yang dibutuhkan untuk implementasi REDD plus," kata Hadad.

Secara terpisah, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas Basah Hernowo mengatakan, Bappenas tengah menyusun rencana program yang akan dibiayai dengan dana hibah itu.

"Rencana program yang akan diajukan itu akan diputuskan Bappenas pada pekan ini. Kami juga harus memutuskan mekanisme pengelolaan dananya, apakah dikelola sebagai dana hibah atau dana pinjaman lunak bagi kontraktor REDD plus," katanya.

Selain menerima komitmen hibah 80 juta dollar AS dari CIF, Basah menjelaskan, Indonesia Climate Trust Fund (ICTF) juga telah menerima hibah dari Departement for International Development (DFID) Inggris senilai 10 juta poundsterling. "Dana dari DFID disalurkan bertahap. Sejumlah 1 juta poundsterling juga digunakan untuk persiapan implementasi REDD," kata Basah.

#### Abaikan kontroversi

Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia M Teguh Surya menilai, tenggat tiga tahun untuk penyiapan pelaksanaan REDD plus itu telah mengabaikan banyaknya kontroversi tentang REDD plus. "Percepatan seperti itu mengabaikan ketidakjelasan mekanisme REDD plus. Bahkan, siapa yang akan membayar dana REDD pun belum jelas," kata Teguh, kemarin di Jakarta.

Menurut dia, REDD berpotensi menutup akses masyarakat adat terhadap hutan. "Jadinya, seperti HPH [hak pengusahaan hutan], tapi tanpa menebang hutan. Soalnya bukan berapa nilai kompensasi yang diterima masyarakat adat, melainkan ada tidaknya jaminan ruang hidup mereka untuk mengakses hutan adat. Dana REDD tidak sebanding dengan manfaat ekonomis hutan bagi masyarakat adat yang memanfaatkannya secara berkelanjutan," kata Teguh. (ROW)